

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan bidang usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu, perbankan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan demikian, sektor perbankan harus mampu mengelola dana masyarakat secara baik dan benar.

Peran sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangatlah besar. Seluruh sektor usaha baik dari sektor industri, jasa, perdagangan, pertanian, perkebunan dan lainnya saling membutuhkan bank sebagai mitra dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran¹. BPR dan BPRS adalah bagian terkecil di dalam dunia perbankan dibandingkan dengan UUS dan BUS. Keberadaan BPR dan BPRS relatif dekat dengan masyarakat yang membutuhkan dana

¹ Undang-undang No. 10 tahun 1998

dengan skala yang relatif kecil. Sehingga pangsa pasarnya pun tidak seluas UUS dan BUS.

BPR dan BPRS memiliki peran penting dalam memberikan pembiayaan, khususnya pada sektor UMKM baik yang ada di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan. Proses yang mudah serta akses yang lebih terjangkau membuat BPR dan BPRS menjadi opsi bagi UMKM-UMKM dibandingkan dengan Bank Umum, sehingga dapat meningkatkan aset BPR dan BPRS. Perkembangan BPR dan BPRS dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Pertumbuhan Jumlah BPR dan BPRS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BPR	1706	1669	1653	1635	1643	1637
BPRS	150	155	158	163	163	163

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2015.

Jumlah BPR yang berbanding terbalik dengan jumlah BPRS seperti pada tabel 1.1 ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah sedang mengalami perkembangan khususnya pada BPRS. Namun khusus pada BPRS di tahun 2013-2015 tidak ada penambahan jumlah BPRS. Melihat data perkembangan jumlah BPR dan BPRS yang kurang mengalami pertumbuhan, tetapi jumlah penyaluran dana yang disalurkan oleh BPR dan BPRS mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, data pertumbuhan penyaluran dana pada BPR dan BPRS sebagai berikut :

Tabel 1.2 Pertumbuhan Penyaluran Dana BPR dan BPRS (Triliun)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BPR	33844	41100	49818	59176	68391	74807
BPRS	2060	2676	3554	4433	5005	5765

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2015

Meningkatnya jumlah kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh BPR dan BPRS ini menunjukkan bahwa minat masyarakat bertransaksi di BPR dan BPRS semakin meningkat tidak hanya di Bank Umum saja. Peningkatan jumlah penyaluran dana ini juga tak terlepas dari kemudahan untuk mengakses BPR dan BPRS itu sendiri, sehingga mempermudah masyarakat untuk menggunakan jasanya.

Didalam dunia perbankan Internasional, khususnya di Indonesia. Lembaga keuangan bank masih mengandalkan kredit/pembiayaan sebagai sumber pendapatan yang utama. Seluruh kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank tidak terlepas dari resiko kredit. Resiko kredit terjadi apabila bank gagal untuk memperoleh kembali kewajiban dari pinjaman yang diberikan. Selain itu, kualitas kredit juga harus diperhatikan karena jika terjadi kredit bermasalah tentunya akan mengancam tingkat kesehatan perusahaan. Dalam hal ini, indikasi kredit bermasalah dapat ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Loan* pada perbankan konvensional dan rasio *Non-Performing Finance* pada perbankan syariah. Besarnya tingkat kredit bermasalah pada BPR dan BPRS dapat dilihat dari Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Pertumbuhan NPL dan NPF (%)

NPL/NPF	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BPR	6,12	5,22	4,75	4,41	4,75	5,37
BPRS	6,50	6,11	6,15	6,50	7,89	8,20

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2015

Besarnya persentase kredit bermasalah yang dialami oleh BPR dan BPRS telah melampaui batas maksimal yang ditetapkan oleh BI. Di dalam PBI No.17/11/PBI/2015 menyebutkan batas maksimal besaran persentase NPF dan NPL adalah 5%. Besarnya persentase NPL dan NPF ini menunjukkan masih banyaknya kredit bermasalah yang terjadi pada BPR dan BPRS walaupun jumlah kredit dan pembiayaan yang disalurkan terbilang meningkat. Pertumbuhan kredit yang baik adalah ketika jumlah penyaluran kredit/pembiayaan meningkat diikuti dengan penurunan persentase kredit bermasalahnya (NPF dan NPL). Pertumbuhan kredit yang dibarengi dengan pertumbuhan kredit bermasalah akan berdampak pada sisi likuiditas dan permodalan pada perusahaan.

Secara nasional perbandingan kredit bermasalah antara Bank Umum, baik syariah maupun konvensional dan BPR/BPRS menunjukkan angka yang cukup tinggi. NPF/NPL BUS dan BUK masing-masing sebesar 2% dan 4,3%². Sementara NPF/NPL pada BPRS dan BPRS masing-masing sebesar 5,37% dan 8,20. Persentase angka NPL/NPF pada BPR dan BPRS yang melewati batas maksimal dapat menjadi sebuah masalah. Melihat adanya

² <http://finansial.bisnis.com/read/20150301/90/407633/npf-bank-syariah-masih-lebih-tinggi-dari-npl-bank-konvensional>

fakta dari data tersebut, menjadi penting untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi NPL/NPF pada BPR/BPRS, khususnya pada sisi eksternal.

Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada lembaga keuangan bank, khususnya BPRS dan BPRS bisa disebabkan dari faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab yang terjadi akibat faktor eksternal seperti faktor inflasi, krisis moneter, kudeta dan kekacauan politik, dan lain sebagainya³. Pengaruh eksternal ini memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap NPL dan NPF pada BPR dan BPRS.

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu⁴. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan daya konsumsi masyarakat akan berkurang, harga-harga komoditas meningkat dan menyebabkan nilai tukar mata uang melemah sehingga nasabah akan cenderung hanya bisa memenuhi kebutuhan primernya saja. Dengan begitu, debitur akan kesulitan membayar kewajibannya kepada bank.

Tabel 1.4 Pertumbuhan Inflasi 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inflasi	6,96%	3,79%	4,30%	8,38%	8,36%	3,35%

Sumber : www.bi.go.id

³ Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi, Bandung: Alfabeta CV, 2014, hal 86

⁴ Adiwarmanto Karim, Ekonomi Makro Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hal. 135

Perkembangan inflasi Indonesia pada tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi. Fluktuasi inflasi yang terjadi dapat terkendali di tengah tekanan yang terjadi akibat dari *administered price* dan *volatile food*. Pada tahun 2013-2014, kenaikan inflasi yang terjadi mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena pada periode tersebut, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebanyak dua kali (22 Juni 2013 dan 18 November 2014). Selain kenaikan BBM, penyesuaian harga komoditas, seperti tarif harga listrik, air, LPG dan kebutuhan lainnya bahkan tarif transportasi umum juga mengalami peningkatan harga. Penurunan angka inflasi yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan oleh harga minyak dunia yang mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2014, sehingga pemerintah menghapus subsidi BBM.

Fluktuasi angka inflasi yang terjadi pada tahun 2010-2015 dibarengi dengan tren penurunan angka PDB sebagai tolak ukur pertumbuhan perekonomian Indonesia. PDB yang menurun mengidentifikasi pendapatan masyarakat yang rendah sehingga menyebabkan debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank dan berakibat pada meningkatnya kredit bermasalah. Grafik pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Pertumbuhan PDB 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PDB	6,22%	6,17%	6,03%	5,55%	5,02%	4,79%

Sumber : www.data.worldbank.org

Meski pada rentan tahun 2010-2015 PDB Indonesia mengalami tren penurunan, namun besarnya angka PDB Indonesia masih berada pada ambang batas yang wajar mengingat angka inflasi pada rentan waktu yang sama masih dalam kondisi terkendali. Penurunan PDB terdalam yang terjadi pada tahun 2014. Perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2014 dipengaruhi oleh pembatasan ekspor mineral dan kondisi politik di Indonesia pada tahun tersebut. Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi rakyat Indonesia karena pada tahun tersebut berlangsung pemilihan presiden pada periode selanjutnya. Ketidakjelasan politik Indonesia yang terjadi sekitar lima bulan mengakibatkan perlambatan realisasi investasi yang karenanya dapat mengurangi ekspansi perekonomian Indonesia⁵.

Sementara itu, nilai tukar mata rupiah merupakan salah satu faktor eksternal kredit bermasalah. Nilai tukar menjadi penting ketika kegiatan usaha dari debitur menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksinya. Sehingga ketika tren nilai kurs rupiah meningkat (seperti pada tabel 1.6) menandakan adanya depresiasi nilai tukar. Depresiasi yang terjadi pada mata uang dalam negeri meningkatkan pinjaman dan debitur tidak mampu membayar pinjaman tersebut⁶.

⁵ <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?>

⁶ Marijana Curak et al, *Determinants of non-performing loans-evidence from Southeastern European Banking systems*, Banks and Bank Systems, Volume 8, Issue 1, 2013, hal. 47

Tabel 1.6 Pertumbuhan Nilai Kurs Rupiah

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai Tukar	9.048	8.779	9.380	10.451	11.878	13.391

Sumber : www.bi.go.id

Depresiasi nilai tukar rupiah yang tinggi terjadi pada tahun 2014-2015. Depresiasi nilai tukar rupiah terjadi pada kuartal IV 2014 dikarenakan terjadinya apresiasi terhadap dollar Amerika Serikat yang terjadi terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Hal ini sejalan dengan rilisnya data perbaikan perekonomian Amerika dan rencana kenaikan suku bunga The Fed (FFR). Sehingga depresiasi yang terjadi pada kuartal IV 2014 terus mengalami peningkatan terhadap dollar.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh variabel makro ekonomi terhadap kredit bermasalah (NPL/NPF) pada perbankan sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah Daisy dan Noven (2015); Zakiyah dan Yulizar (2011); serta Irman Firmansyah (2014). Daisy dan Zakiyah menjelaskan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah. Sementara Irman menjelaskan bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah. Daisy dan Irman menjelaskan bahwa pergerakan Inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kredit bermasalah. Sedangkan Zakiyah menjelaskan bahwa pergerakan inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kredit bermasalah. Zakiyah dan Yulizar menyebutkan Nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL dan NPF.

Penelitian ini diteliti karena adanya *research gap*, yaitu ketidak konsistenan hasil pada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Daisy dan Noven (2015) yang berjudul “Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Spesifik Bank Terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2003-2014”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Daisy dan Noven (2015) yaitu membandingkan pengaruh variabel makro ekonomi terhadap NPL dan NPF, sedangkan pada penelitian Daisy dan Noven meneliti adanya pengaruh atau tidak variabel makro ekonomi dan spesifik bank terhadap BUS dan UUS. Penggunaan periode penelitian ini menggunakan periode 2010-2015 sedangkan penelitian Daisy dan Noven menggunakan periode 2003-2014. Objek penelitian pada penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan Daisy dan Noven objek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *Vector Autoregression*, sedangkan pada penelitian Daisy dan Noven menggunakan regresi linier berganda. Alasan pemilihan objek penelitian ini karena BPR dan BPRS memiliki kecenderungan yang sama dalam penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor UMKM dan memiliki modal yang relatif kecil dibandingkan dengan Bank Umum. Selain itu perbedaan sifat penyaluran dana pada kedua lembaga keuangan ini dimana BPRS senantiasa menggunakan *underlying asset* dalam pembiayaannya (contoh:

Murabahah), sedangkan BPR tidak menggunakan *underlying asset*, serta banyaknya variasi akad di dalam pembiayaan BPRS yang dapat menyebabkan perbedaan pengaruh terhadap kredit bermasalah bila dibandingkan dengan BPR yang produk kreditnya menggunakan bunga.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan adanya gap dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor makro ekonomi apa saja yang berpengaruh terhadap NPL dan NPF dengan judul **“PERBANDINGAN PENGARUH GEJALA MAKRO EKONOMI TERHADAP *NON PERFORMING LOAN* PADA BPR DAN *NON PERFORMING FINANCE* PADA BPRS PERIODE 2010-2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh gejala makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
2. Bagaimana pengaruh gejala makroekonomi terhadap kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat?
3. Bagaimana respon pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat terhadap gejala makroekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh gejala makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh gejala makroekonomi terhadap kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat.
3. Untuk mengetahui perbandingan respon pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat terhadap gejala makroekonomi

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari manfaat praktis maupun manfaat teoritik. Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus pengembangan di dalam ilmu ekonomi dan perbankan Islam bagi pembaca atau peneliti lainnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPR dan BPRS di Indonesia sebagai salah satu peringatan dini (early warning system) untuk mencegah besarnya pembiayaan/kredit

bermasalah yang diakibatkan oleh gejolak makro ekonomi yang tidak menentu tiap harinya.

3. Kegunaan bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi penulis tentang pengaruh inflasi, nilai kurs rupiah dan produk domestik bruto terhadap NPL di BPR dan NPF di BPRS dan untuk mengembangkan penelitian yang sesuai dengan topik tersebut.